

ARTIKEL >> 2 - 5

- Tangga Darurat di Bulan Suci, Penanganan Gempa Jawa Barat ● Gempa Sumatera Barat
- Partisipasi Masyarakat Mewujudkan Ketahanan Bencana

LAPORAN UTAMA >> 6 - 7

- Ayat-ayat Penganggulangan Bencana, Perjalanan Pembuatan Perdes PRB

LAPORAN KHUSUS >> 8 - 10

- Hidup dibawah Berkah Merapi, Sekilas Perjalanan Mengembangkan PRB ● Refleksi Seorang Pendamping, Melakukan yang Terbaik Bersama Masyarakat

PROFIL >> 11 - 12

- Suyatno, Pemuda Pendidik Tanggap Bencana
- Yatin, Bapak Desa dari Ngargomulyo

dari redaksi

Warta DRR edisi kedua ini memfokuskan pada pengalaman pengurangan risiko bencana (PRB) di desa Ngargomulyo, kecamatan Dukun, kabupaten Magelang, propinsi Jawa Tengah.

Berbagai upaya dan kegiatan PRB telah dilakukan Forum PRB bersama dengan masyarakat desa Ngargomulyo, khususnya dalam melakukan kesiapsiagaan terhadap ancaman meletusnya gunung Merapi. Forum PRB berupaya, antara lain, menginisiasi kegiatan pengurangan risiko awan panas dan debu vulkanik dengan melakukan konservasi hutan. Kegiatan ini sekaligus berfungsi untuk menjaga kelestarian lingkungan dan alam. Kesiapsiagaan Forum PRB, masyarakat, dan pemerintah desa dalam penanggulangan bencana diwujudkan melalui latihan evakuasi bersama jajaran dinas-dinas di tingkat kabupaten.

Melalui tulisan-tulisan pengalaman Forum PRB desa Ngargomulyo, kita memahami lebih dalam program Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat atau *Community Managed Disaster Risk Reduction* yang menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat. Dalam konteks program ini, metode pengorganisasian masyarakat melalui pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) menjadi kunci utama keberhasilan program. Forum PRB berperan sebagai motivator dan penggerak utama kegiatan PRB di desa.



Dalam laporan utama bertajuk Ayat-ayat PRB, diuraikan upaya yang dilakukan Forum PRB desa Wukirsari dan desa Ngargomulyo dalam rangka mendapatkan dukungan dari pemerintah lokal dalam bentuk peraturan desa tentang PRB. Advokasi kebijakan publik merupakan salah satu kegiatan penting untuk mendorong dilaksanakannya PRB secara konsisten. Selain itu, ditetapkannya peraturan tentang PRB menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan program PRB di desa.

Akhirnya, sepenggal cerita pengalaman masyarakat desa dalam pengurangan risiko bencana dapat memberikan inspirasi untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat menanggulangi bencana. Selamat membaca!

Tanggap Darurat di Bulan Suci Penanganan Gempa Jawa Barat

Gempa pada tanggal 3 September 2009 yang berpusat di Tasikmalaya, Jawa Barat, telah menyebabkan 79 orang meninggal dunia, 21 orang hilang, 1.254 orang luka-luka, 63.717 unit rumah rusak berat, dan 131.216 unit rumah rusak ringan, belum terhitung gedung sekolah serta fasilitas lainnya. Hingga saat ini masih banyak masyarakat terdampak gempa yang tinggal di tenda-tenda darurat karena rumah mereka rusak berat dan berbagai barang keperluan sehari-hari pun tertimbun reruntuhan bangunan sehingga tidak dapat diakses. Sampai dengan 8 September, jumlah pengungsi mencapai angka 210.000 orang.

Meski telah banyak bantuan mengalir, namun luasnya area bencana dan besarnya jumlah pengungsi menyebabkan distribusi bantuan tidak merata sehingga masih banyak daerah yang membutuhkan uluran tangan dari para dermawan. Beranjak dari kondisi tersebut, Tim Olah Raga, Kesenian, dan Sosial (ORKESS), Bina Swadaya Group tergerak untuk menjembatani niat baik seluruh rekan-rekan di lingkungan Bina Swadaya yang ingin memberikan sumbangan dan bentuk kepedulian lainnya bagi mereka yang terkena dampak gempa di Jawa Barat dalam wujud kegiatan “Peduli Korban Gempa di Bulan Suci”.

Menggalang Bantuan

“Peduli Korban Gempa di Bulan Suci” ini dilaksanakan dalam beberapa bentuk kegiatan, yaitu penggalangan dana dan bantuan dari seluruh karyawan-karyawati serta PT-PT di lingkungan Bina Swadaya, distribusi bantuan secara langsung ke lokasi kejadian, serta sahur bersama di lokasi pengungsian.

Penggalangan dana dan bantuan berlangsung selama tiga hari secara serentak di seluruh Gugus Kegiatan Bina Swadaya, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 September 2009. Dari kegiatan ini berhasil dikumpulkan sejumlah dana, pakaian layak pakai yang terdiri dari pakaian anak-anak, wanita, dan laki-laki dalam beragam model dan ukuran. Selain itu, juga diperoleh buku-buku bacaan dari Penebar Swadaya, salah satu penerbit Bina Swadaya.

Kemudian sebagaimana telah direncanakan sejak awal, seluruh bantuan yang terkumpul

didistribusikan langsung ke lokasi oleh sejumlah panitia dari Tim ORKESS maupun sukarelawan dari rekan-rekan di lingkungan Yayasan Bina Swadaya yang tergabung dalam Tim Peduli Gempa.

Tim yang terdiri dari 17 orang melakukan persiapan pada 11 September 2009 sore. Keesokan paginya, tim bergerak menuju Cianjur. Setiba di tempat tujuan, tim melakukan koordinasi dengan para relawan dari Follic (Forum Lintas Laku Independen Cianjur) untuk mempelajari informasi situasi terkini.

Lokasi Berubah

Semula, Tim Peduli Gempa berniat menyalurkan bantuan ke desa Cikangkareng, kecamatan Cibinong yang berjarak sekitar 4 jam perjalanan dari Cianjur. Namun, berdasarkan informasi dari relawan di lapangan, ada beberapa titik bencana yang belum memperoleh bantuan, termasuk kecamatan Sindangbarang yang berjarak 6 jam perjalanan dari pusat kota Cianjur. Rupanya publikasi besar-besaran dari media massa terhadap wilayah tersebut menyebabkan hampir seluruh bantuan terkonsentrasi di sana sehingga sembako yang ada di posko tersebut sudah berlebih. Di samping itu, medan yang jauh dan sulit juga menyebabkan tidak meratanya distribusi bantuan di lokasi bencana.

Sehingga kemudian diputuskan untuk mengubah lokasi tujuan ke desa Muara Cikadu, Kecamatan Sindangbarang. Rombongan dipandu relawan Follic yang mengenal wilayah itu dengan baik. Kedatangan Tim Peduli Gempa disambut hangat masyarakat yang rupanya memang belum mendapatkan bantuan yang cukup. Bantuan yang diberikan berupa paket sembako dan uang tunai untuk membantu kebutuhan dapur umum di masing-masing posko.

Penyerahan bantuan ini berlangsung hingga tengah malam. Rombongan kemudian beristirahat di posko pengungsian kampung Cisitua dengan mendirikan tenda yang telah disiapkan rombongan. Beberapa orang yang tidak tertampung kemudian bergabung dengan pengungsi yang tidur di beberapa tenda. Saat dini hari, anggota tim mengadakan acara sahur bersama warga.

Setelah sahur, rombongan bertolak menuju desa Cikangkareng, lokasi bencana terparah dimana longsor batu-batu besar menimbun sebuah kampung. Situasi di desa ini sudah sepi karena evakuasi korban sudah dihentikan sejak sehari sebelumnya. Akhirnya, sekitar pukul 09.00 WIB rombongan bertolak kembali ke Cianjur untuk selanjutnya pulang menuju Jakarta. (Anang Arifin & Nia Noorrahmah).

GEMPA SUMATERA BARAT

Rabu tanggal 30 September 2009 pada pukul 17:16 WIB, gempa berkekuatan 7,9 SR mengguncang Padang dan sekitarnya. Pusat gempa berada di 52 km barat daya Pariaman dan tidak berpotensi tsunami. Kendati begitu, dampak yang ditimbulkan gempa amat hebat. Terdapat 13 lokasi kabupaten/kota yang terkena dampak gempa di Sumatera Barat yakni kota Padang, kota Pariaman, kota Bukittinggi, kab. Padang Pariaman, kab. Pesisir Selatan, kota Solok, kota Padang Panjang, kab. Pasaman, kab. Pasaman Barat, kab. Solok, kab. Agam, kab. Tanah Datar, kab. Kepulauan Mentawai. Hingga Jum'at (09/10) pukul 13.00 WIB, total korban tewas akibat gempa Sumatera Barat mencapai 787 orang. Sementara, total orang hilang sebanyak 241 orang, luka berat 883 orang, luka ringan 1.366 orang dan total pengungsi 410 orang.

Berdasarkan data laporan Satlak PB/BPBD kabupaten/kota yang masuk ke Satkorlak PB Propinsi Sumatera Barat, rumah penduduk yang rusak berat mencapai 124.300 unit, rusak sedang 61.139 unit dan rusak ringan 63.997 unit. Sementara untuk fasilitas pendidikan yang rusak berat : 1.384 unit, rusak sedang : 1.018 unit, rusak ringan 744 unit. Fasilitas kesehatan : 55 rusak berat, 35 rusak sedang, 28 rusak ringan. Kantor : 241 rusak berat, 82 rusak sedang, 73 rusak ringan. Jalan : 168 unit rusak berat, 65 unit rusak sedang, 26 rusak ringan. Jembatan : 16 unit rusak berat, 28 unit rusak sedang dan 5 unit rusak ringan. Irigasi : 40 unit rusak berat, 24 unit rusak sedang, dan 22 unit rusak ringan. Gempa juga menyebabkan kerusakan pada sejumlah fasilitas umum lainnya seperti pasar dan rumah ibadah. Pasar yang rusak berat : 37 lokasi, rusak sedang 22 lokasi, dan rusak ringan 22 lokasi. Rumah ibadah : 1.214 rusak berat, 569 rusak sedang, dan 371 rusak ringan. Sedangkan total kerugian material akibat gempa hingga saat ini mencapai Rp. 2.185.521.400.000,- (dua trilyun seratus delapan puluh lima milyar lima ratus dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).

Kondisi Padang Masa Tanggap Darurat

Saat mengunjungi kota Padang, terlihat kondisi yang cukup mengenaskan. Bangunan hotel, pusat perbelanjaan, rumah, sarana ibadah, gedung pemerintahan, sekolah, dan toko hancur. Tenda-tenda pengungsi dan kotak sumbangan bermunculan hampir di setiap sudut kota Padang. Bau anyir mayat yang belum dapat dievakuasi dari bangunan hotel maupun *mall* yang hancur

menyelimuti atmosfer. Bau anyir terasa mendominasi udara di malam hari saat asap kendaraan bermotor mulai menghilang.

Kesibukan menangani kondisi tanggap darurat (*emergency response*) penanganan korban gempa mewarnai pemandangan sehari-hari di Padang. Rumah Dinas Gubernur difungsikan sebagai Posko Penanganan Gempa. Berbagai institusi nasional maupun internasional berbaur dan bersinergi untuk dapat segera menyelamatkan korban gempa. Tercatat beberapa lembaga internasional yakni UN-OCHA, USAR (United SAR), UNDP, IOM, Unicef, JPF, GTZ, team SAR dari beberapa negara (Jerman, Korea, Spanyol, Turki, Jepang), militer dari Australia dan Arab, Child Fund, Save The Children, AMDA Jepang, AAR Jepang, Peace Wind Japan, Cordaid, dan beberapa lembaga lainnya. Sedangkan dari Indonesia, tercatat lembaga BNPB, team SAR dari unsur organisasi masyarakat, mahasiswa dan pecinta alam, Bina Swadaya, Dian Desa, PT.



Newmont, polisi, angkatan udara, angkatan darat, angkatan laut, pemerintah propinsi Sumatera Barat, media cetak dan elektronik, dan masih banyak lagi. Semua larut dalam upaya pencarian dan penyelamatan korban serta distribusi bantuan bagi korban.

Bantuan Untuk Siswa SLB

Selama di Padang (5 – 9 Oktober 2009), Bina Swadaya melakukan kegiatan mendampingi LSM dari Jepang yakni Peace Wind dan AAR. Peace Wind didampingi oleh Ikhwan Safaat melakukan pendistribusian bantuan makanan kepada masyarakat di kota Pariaman, sedangkan AAR didampingi Agung Prasetyo melakukan distribusi bantuan kepada siswa sekolah luar biasa (SLB) di kota Padang.

Untuk bantuan kepada siswa SLB di kota Padang, koordinasi dilakukan dengan Dinas Pendidikan

Propinsi Sumatera Barat. Pertemuan koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan staf berlangsung di teras kantor karena gedung kantor Dinas Pendidikan mengalami kerusakan parah. Selanjutnya koordinasi dilakukan bersama Kepala Sekolah SLB di kota Padang di gedung YPPLB (salah satu SLB) Padang.



Dari pendataan awal, diperoleh sekitar 10 SLB dengan jumlah siswa 565 orang yang akan diberi bantuan. Paket bantuan yang akan diberikan berupa air galon, ikan kaleng, beras, lilin, dsb. Bukan hal yang mudah untuk memperoleh atau membeli barang-barang yang akan diberikan di tengah kondisi *emergency* di kota Padang. Hampir seluruh toko hancur dan semua orang membutuhkan barang-barang tersebut. Dengan berbagai cara dan menggunakan segala sumber dan kemampuan, pada akhirnya terpenuhi paket bantuan tersebut. Selanjutnya untuk proses pendistribusian paket bantuan dilakukan oleh Kepala Sekolah dan guru-guru dari masing-masing sekolah SLB.

Setelah penanganan tanggap darurat, tahap selanjutnya adalah rehabilitasi dan rekonstruksi. Semoga segera pulih dan dapat membangun kembali kehidupan. (Agung Prasetyo).

Partisipasi Masyarakat Mewujudkan Ketahanan Bencana

Utsai bencana gempa bumi yang disusul tsunami Aceh tahun 2005, silih berganti kita disadarkan adanya berbagai bencana alam dengan dampak kecil maupun besar. Seperti gempa bumi di Nias, Jogjakarta, Papua, Tasikmalaya, dan di Padang yang meninggalkan dampak kerusakan yang parah bahkan kematian yang jumlahnya sangat besar. Oleh karena itu selain kegiatan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi, upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB) menjadi hal penting dilakukan untuk meminimalisir dampak yang besar.

Partisipasi untuk Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat

Peristiwa gempa bumi yang melanda Yogyakarta dan Jawa Tengah pada bulan Mei 2006 telah membuka kesadaran Bina Swadaya bahwa selama ini pendampingan masyarakat berfokus pada peningkatan kualitas hidup dan peningkatan pendapatan – namun mengabaikan faktor risiko bencana. Kemandirian kelompok masyarakat secara sosial dan ekonomi yang telah dicapai, menjadi luluh lantak karena masyarakat tidak siap menghadapi dampak bencana.

Bina Swadaya dan Cordaid bekerja bersama masyarakat melaksanakan program Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat atau *Community Managed Disaster Risk Reduction* di tiga wilayah. Yaitu, Dusun Pucung, Kabupaten Bantul – Yogyakarta, Dusun Gajihan, Kabupaten Klaten – Jawa Tengah, dan Desa Ngargomulyo, Kabupaten Magelang – Jawa Tengah. Ancaman bencana yang dihadapi di Dusun Pucung adalah kekeringan dan gempa bumi. Di Dusun Gajihan adalah gempa bumi. Sedangkan di Desa Ngargomulyo adalah meletusnya gunung berapi.

Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat (PRB BM) dimaknai sebagai sebuah proses pemberdayaan komunitas melalui pengalaman menghadapi dan mengatasi bencana yang bertumpu pada kegiatan partisipatif. Kegiatan partisipatif dimaksud adalah melakukan kajian, membuat perencanaan, mengorganisir masyarakat membentuk Forum PRB yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menanggulangi bencana sebelum, saat, dan sesudah terjadi bencana.

Sasaran program PRB ini adalah perubahan pola pikir dan ketahanan masyarakat terhadap bencana. Fokus utama partisipasi masyarakat adalah menumbuhkan, membangkitkan jiwa atau semangat pada diri masyarakat bahwa mereka memiliki kemampuan atau kapasitas dalam menanggulangi dan mengurangi risiko bencana.

Kapasitas tersebut ditunjukkan dengan melakukan identifikasi dan analisis risiko bencana hingga menghasilkan suatu rencana aksi masyarakat. Berdasarkan rencana aksi tersebut masyarakat di tiga wilayah program PRB melaksanakan kegiatan pendidikan kebencanaan dan pembelajaran sosial yang berkesinambungan, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, membangun sistem peringatan dini, belajar dan bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mencari solusi pemecahan masalah dengan berorientasikan pada pemberdayaan secara kelompok maupun individu, dan melakukan advokasi kepada pemerintah untuk mendorong perubahan institusi lokal dan kebijakan publik yang mempengaruhi kehidupan mereka, serta mulai mengintegrasikan kegiatan peningkatan mata pencaharian (*livelihood*) yang tidak hanya memberi manfaat ekonomi tetapi juga menjaga dan melestarikan lingkungan.

Forum PRB sebagai Agen Perubahan

Berangkat dari keterbatasan yang dimiliki masyarakat (khususnya masyarakat yang terkena dampak bencana), maka pendampingan pemberdayaan selanjutnya tidak menyeret mereka ke dalam ketergantungan yang akan melestarikan keterpurukannya. Strategi yang paling relevan adalah membentuk wahana yang dibentuk **dari-oleh-untuk** mereka, yang memberi kesempatan pada mereka untuk saling membantu dan berkembang, tanpa menutup kemungkinan keterlibatan pihak luar. Dalam program PRB di tiga wilayah ini, wahana tersebut adalah Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB).

Forum PRB merupakan agen utama penggerak kegiatan PRB di setiap dusun dan desa. Pengurus dan anggota Forum PRB adalah individu-individu yang memiliki kepedulian dan mereka datang dari berbagai peran yang ada di desa. Ada yang merupakan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pendidik, petugas lapangan, bidan, anggota PKK, pedagang, perajin, aparat pemerintah, dsb.

Saat ini Forum PRB bersama masyarakat dan para pemangku kepentingan di tiga wilayah program mulai menampakkan perubahan dengan capaian-capaian kegiatan yang cukup signifikan. Pemahaman masyarakat tentang pengurangan risiko bencana di tiga lokasi semakin meningkat. Hal ini tercapai melalui pelatihan dan proses sosialisasi terus menerus yang dilakukan oleh anggota forum dan dibantu oleh pendamping dari Bina Swadaya. Hingga akhirnya masyarakat mulai jeli melihat potensi dan kapasitas yang mereka miliki dan siap mengurangi risiko bencana. Anggota forum dan pendamping juga mendorong partisipasi masyarakat di kegiatan-kegiatan forum dalam bentuk tenaga dan dana, agar masyarakat merasa memiliki kegiatan dan hasilnya. Untuk selanjutnya, diharapkan masyarakat dapat menjaga dan mengembangkannya secara inisiatif dan swadaya. Forum PRB dusun Pucung – Bantul, mengupayakan perbaikan dan pembangunan baru jaringan air. Selain itu, dengan menggunakan dana dari Cordaid, Forum berinisiatif melakukan pengerasan jalan antar dusun untuk dijadikan jalur evakuasi. Forum mengajak dinas-dinas pemerintahan, lembaga-lembaga lain, dan masyarakat untuk terlibat dalam bentuk sumbangan pengetahuan, materi, dan tenaga. Ajakan ini mendapat sambutan positif. Pemerintah dan lembaga-lembaga lain berkontribusi dalam hal dana. Sedangkan pada pelaksanaannya, masyarakat bergotong royong membangun berbagai infrastruktur di wilayahnya. Sebagai tindak lanjutnya, masyarakat memperbaiki dan merawat sarana tersebut secara inisiatif dan mandiri.

Sementara itu, Forum PRB desa Ngargomulyo di Magelang secara teratur melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan mengikuti pertemuan-pertemuannya. Tujuannya menyampaikan perkembangan terbaru mengenai PRB dan kegiatan

Forum, dan agar pemerintah desa mendukung kegiatan Forum. Sebagai hasilnya, pemerintah desa telah menjadikan Forum sebagai mitra kerjanya, mengkaitkan rencana pembangunan desa dengan upaya PRB, dan mensinergikan seluruh unsur/lembaga yang bekerja dalam isu PRB di desa tersebut agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

Ketika terjadi gempa bumi tiga tahun lalu, banyak warga dusun Gajihan - Klaten yang tidak tahu jalur untuk menyelamatkan diri, lokasi kumpul, dan tempat pengungsian. Pada waktu itu warga tidak memiliki kesiapsiagaan. Mereka memanfaatkan lapangan volley yang cukup luas untuk tempat mengungsi. Akan tetapi, tidak ada pelindung dan tidak didukung fasilitas lain yang memadai. Sebagai akibatnya, masyarakat dengan mudah jatuh sakit. Belajar dari pengalaman yang lalu, Forum PRB bersama desa merancang jalur evakuasi dan membuat rambu penunjuk jalur di sembilan lokasi. Jalur dan rambu evakuasi tersebut bukan hanya mengarahkan warga ke lokasi pengungsian, akan tetapi juga mengarahkan warga ke pos pengobatan terdekat. Terdapat tiga pos pengobatan yang ditentukan sebagai pos pertolongan pertama. Lokasi pengungsian disiapkan di lapangan volley dengan pertimbangan cukup luas dan dekat dengan sumber-sumber air. Bermodalkan dana stimulan yang tersedia, Forum PRB berinisiatif membeli tenda untuk melindungi warga di lokasi pengungsian dan alat komunikasi (perangkat radio *handy talky*). Masyarakat memahami manfaat fasilitas siaga bencana yang dikelola forum dan mereka berkomitmen untuk merawat fasilitas yang ada secara gotong royong.

Kemandirian

Dengan terlibat aktif dalam program PRB, masyarakat semakin menyadari ancaman bencana di wilayah mereka. Di sisi lain, tumbuhnya kesadaran itu mendorong masyarakat menemukan jawaban terhadap ancaman tsb berdasarkan kemampuan dan peluang yang mereka miliki. Jawaban itu kemudian diwujudkan secara konsisten. Sehingga akhirnya tumbuh kekuatan dan kemandirian dalam menghadapi ancaman bencana. Proses menuju kemandirian juga terlihat pada Forum PRB. Dalam hal manajemen, Forum telah memiliki kemampuan otonom untuk membina diri dan mengelola kegiatan di tingkat dusun atau desa. Kemandirian ekonomi juga telah ditapaki oleh Forum melalui berbagai kegiatan produktif guna memenuhi kebutuhan materi dasar, cadangan, dan mekanisme untuk dapat bertahan pada waktu krisis. (Ikasari).

untuk memurnikan pikiran,
mulailah dengan mengurangi hasrat
dan mengenal kebahagiaan
untuk memurnikan lingkungan, mulailah dengan
memberikan perhatian untuk orang lain
(Master Sheng Yen)

AYAT-AYAT PENANGGULANGAN BENCANA

Perjalanan Pembuatan Perdes PRB

Mengacu pada Kerangka Aksi Hyogo, Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia, telah berkomitmen untuk melaksanakan pengurangan risiko bencana. Tindakan nyata itu diwujudkan antara lain dengan mensahkan UU no. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang menjadi landasan dalam sistem hukum nasional untuk penanganan bencana di Indonesia dan untuk penyusunan serta penetapan peraturan di bawahnya.

Hal ini telah memberi inspirasi bagi Forum PRB dalam mendorong pembuatan kebijakan publik di tingkat desa. Forum PRB melakukan lobi dan advokasi agar pemerintah desa merancang dan mensahkan peraturan desa (Perdes) tentang PRB yang mempunyai dampak bagi masyarakat luas bagi secara langsung maupun tidak langsung.

Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Masyarakat berhak dan berkewajiban memberikan masukan secara lisan maupun tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan desa. Oleh karenanya, isi Perdes ditentukan oleh keinginan masyarakat dan menekankan partisipasi masyarakat. Hal ini harus dilakukan dengan menjaring aspirasi dan melibatkan masyarakat secara maksimal. Karena itu, peraturan ditentukan melalui musyawarah

Secara umum pembuatan peraturan desa harus memenuhi 3 syarat. Yaitu *filosofis*, *sosiologis* dan *hukum*. Filosofis yaitu berhubungan dengan norma yang ada di masyarakat. Sedangkan, sosiologis berhubungan dengan kebutuhan masyarakat. Dan secara hukum, Perdes tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya.

Berikut jalinan cerita proses penyusunan Perdes tentang PRB di desa Wukirsari, kecamatan Imogiri, kabupaten Bantul, Yogyakarta dan desa Ngargomulyo, kecamatan Dukun, kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Berawal dari Kekeringan

Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Pucung khususnya Divisi Kekeringan sejak awal menyadari kebutuhan akan adanya peraturan desa berkaitan dengan pengurangan risiko bencana, terutama ketika hendak melaksanakan rencana aksi untuk mengatasi kekeringan di wilayah Pucung.

FPRB mendatangi pemerintah desa untuk menyampaikan rencana kegiatan pengadaan air bersih dan meminta dukungan. Pemerintah desa menanggapi kebutuhan ini dengan baik dan mengeluarkan Surat

Keputusan yang menyatakan bahwa kegiatan Divisi Kekeringan FPRB dilakukan dengan sepengetahuan desa dan untuk membantu pemerintah desa dalam mengatasi kekeringan.

Di sisi lain, dalam menjalankan fungsi dan perannya yang lebih luas, FPRB juga membutuhkan legalitas dari pemerintah desa sebagai payung hukum untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Bentuk legalitas yang diperlukan adalah Peraturan Desa (Perdes) tentang Penanggulangan Bencana.

Untuk mencapai disahkannya Perdes tersebut tentunya melewati beberapa tahapan proses. Yaitu, (1) diseminasi pemahaman pengurangan risiko bencana, (2) penyusunan *draft* Perdes, (3) pembahasan *draft* untuk menjadi rancangan Perdes, dan (4) pembahasan serta pengesahan rancangan menjadi Perdes. Proses ini secara keseluruhan memakan waktu kurang lebih 5 bulan.

Selama 2 bulan pertama merupakan proses diseminasi. Baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah desa beserta jajarannya. Diseminasi dilakukan secara informal dan formal.

Secara informal misalnya dengan melakukan curah pendapat dan diskusi dengan masyarakat, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa di forum-forum atau tempat-tempat informal di desa Wukirsari. Meskipun informal, pada kenyataannya tidaklah semudah yang dibayangkan. Diperlukan usaha-usaha yang terus menerus, tak kenal lelah, dan kesabaran tinggi. Apalagi tidak mudah untuk mencari waktu yang sesuai dan memilih topik yang tepat untuk mengarah pada diskusi pengurangan risiko bencana.

Begitu pula pada pertemuan-pertemuan formal. Pembahasan pembuatan Perdes ini terhambat atau dikesampingkan karena ada hal-hal lain yang dianggap lebih penting untuk dibahas.

Akhirnya setelah 2 bulan proses diseminasi dapat dituntaskan. Lebih dari itu, pengurus FPRB juga memperoleh berbagai informasi yang mendukung perancangan Perdes. Antara lain, apa yang diinginkan oleh masyarakat, apa yang diinginkan oleh pemerintah desa, bagaimana bentuknya, bagaimana tanggungjawab dan kewenangan masing-masing pihak yang terkait, dsb.

Berbagai informasi tersebut menjadi dasar pembuatan naskah akademis dan konsep Perdes tentang Penanggulangan Bencana. Selanjutnya pendamping menawarkan dan mendiskusikan naskah dan konsep bersama FPRB, yang kemudian mengajukannya kepada pemerintah desa dan BPD untuk dikaji. Tujuan kajian ini untuk memastikan kebutuhan semua pihak sudah diakomodir. Sehingga dalam pelaksanaannya kelak akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

FPRB, Pemerintah Desa dan BPD secara terpisah selama seminggu mengkaji konsep Perdes, kemudian mereka

mendiskusikannya secara pleno. Hasil diskusi pleno ini menjadi acuan pembuatan *draft* awal Perdes.

Perlu waktu sekitar 2 minggu untuk membuat *draft*. Selama seminggu *draft* ini pun dikaji kembali oleh masing-masing pihak yang terlibat, lalu diplenokan untuk mencapai kesepakatan sebuah rancangan Perdes.

Rancangan Perdes ini kemudian diberikan kepada semua pihak yang terlibat untuk dipelajari, dipahami, dan dikoreksi secara menyeluruh. Rancangan Perdes ini terdiri dari 13 bab, 73 pasal, dan 92 ayat. Setiap bab, pasal, ayat, dan kalimat yang tertera dalam rancangan Perdes ini di bahas secara detail oleh seluruh anggota/pengurus/tim masing-masing. Proses ini memakan waktu kurang lebih 2 bulan

Tiba saatnya pembahasan rancangan Perdes secara pleno. Pembahasan ini diselenggarakan pada hari Senin 30 Maret 2009 di kantor Desa Wukirsari dan dihadiri 17 orang dari BPD, 6 orang dari Pemerintah Desa, 2 orang dari FPRB dan 2 orang pendamping dari Bina Swadaya.

Ketua BPD memimpin pembahasan ini. Satu persatu bab, pasal, dan ayat diulas hingga disepakati adanya beberapa perubahan.

Setelah hasil revisi dibacakan ulang oleh notulis, kepala desa menyatakan agar rancangan Perdes ini dapat disahkan dan dipakai sebagai acuan dalam kegiatan untuk meminimalisir resiko bencana dan dalam kegiatannya selalu berkoordinasi dengan baik. Ketua BPD mendukungnya dengan menyetujui rancangan ini untuk disahkan dan diberlakukan. Peraturan Desa Wukirsari Nomor 06/PD/WKS/2009 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Bencana lalu disahkan serta ditandatangani pada hari yang sama, pada pukul 15.40 WIB.

Dengan disahkan dan terbitnya Perdes Wukirsari tentang penanggulangan bencana ini, FPRB Pucung dapat berperan dan berfungsi secara optimal serta dapat melaksanakan kegiatannya dengan lebih percaya diri. Di samping itu, kerja FPRB dengan pemerintah desa Wukirsari dapat terkoordinir lebih baik demi kepentingan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana.



Mengelola Lingkungan Mencegah Ancaman Bencana

Ketika Yatin mulai menjabat sebagai kepala desa pada tahun 2007, beliau membentuk tim yang tujuannya menggali gagasan dan masukan dari masyarakat untuk pembangunan desa ke depan. Tim tersebut terdiri dari masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur pemerintah lainnya. Dari ajang tersebut, tertampunglah berbagai gagasan dan persoalan di tingkat RT, RW, dusun, hingga desa.

Salah satu gagasan yang muncul dari masyarakat yaitu alam dan lingkungan yang tidak dijaga akan mengancam kehidupan masyarakat dan berpotensi menyebabkan terjadinya bencana. Masyarakat sangat menyadari penanggulangan bencana erat kaitannya dengan keberadaan berbagai sumberdaya alam dan lingkungan hidup seperti hutan, air, pasir, bebatuan, dsb.

Banyak gagasan dan masalah yang terkumpul. Lalu semua itu dibawa ke Balai Desa untuk didiskusikan dan diseleksi mana yang perlu diproses lebih lanjut menjadi peraturan. Permasalahan-permasalahan yang perlu diatur kemudian dibuat menjadi rancangan peraturan desa (Raperdes).

Raperdes itu kemudian disampaikan dan dikonsultasikan ke kabupaten untuk dikaji lebih lanjut dan mendapat persetujuan. Berdasarkan hasil kajian kabupaten, salah satu Raperdes yang perlu dilanjutkan adalah tentang Tata Kelola Lingkungan.

Raperdes tsb kemudian disosialisasikan ke Forum PRB dan masyarakat untuk lebih diberi bobot dan dipertajam. Hingga akhirnya rancangan peraturan itu sarat dengan muatan PRB.

Langkah selanjutnya adalah mengirimkan rancangan ke kabupaten untuk dikaji kelayakannya secara yuridis bersama bagian hukum, lingkungan hidup, pertambangan, dan sumberdaya alam. Setelah dikaji, rancangan yang sudah final tsb dikembalikan lagi ke desa untuk disosialisasikan melalui berbagai pertemuan dan melalui pembagian selebaran. Tahap terakhir adalah pengesahan Raperdes menjadi Perdes oleh kepala desa pada tahun 2009.

Walaupun sudah disosialisasikan kepada masyarakat berulang kali, tetap saja ada pihak-pihak yang setuju dan tidak setuju dengan pengesahan Perdes. Hal tersebut dianggap wajar oleh Kepala Desa Ngargomulyo. "Bisa saja pandangan kurang setuju itu karena salah persepsi terhadap isi Perdes. Untuk itu, perlu penjelasan lebih lanjut dalam bentuk Juklak dan Juknis, selain proses sosialisasi yang terus diupayakan. Tujuannya tidak lain agar lingkungan hidup dapat dikelola dengan bijak demi kehidupan masyarakat itu sendiri dan untuk mendukung pengurangan potensi bencana," tegas Pak Yatin, sang kepala desa.

(Sri Setya Utama dan Edie Nugroho - Pendamping dari Yogyakarta & wawancara dengan Bpk. Yatin).

Hidup di Bawah Berkah Merapi

Sekilas Perjalanan

Mengembangkan PRB

Pada bulan Oktober 2007, Bina Swadaya memperkenalkan program pengurangan risiko bencana (PRB) di dusun Gemer yang merupakan bagian dari desa Ngargomulyo, Magelang. Perkenalan tersebut dilakukan melalui kegiatan perencanaan partisipatif untuk penanggulangan risiko bencana. Yaitu suatu kegiatan dimana masyarakat diajak untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi bencana alam di wilayahnya, untuk selanjutnya merumuskan rencana aksi bersama penanggulangan risiko. Diharapkan melalui kegiatan ini, masyarakat dapat menyadari potensi bencana di wilayahnya, mengetahui bagaimana mengelolanya, dan berpartisipasi dalam kegiatan PRB.

Kegiatan itu diawali dengan mengajak masyarakat untuk mengingat kembali sejarah meletusnya gunung Merapi, memetakan daerah mana dan siapa yang paling rawan terkena akibatnya, kemampuan yang sudah dimiliki desa dan masyarakatnya untuk menangani peristiwa gunung meletus, dan pihak-pihak mana saja yang potensial untuk diajak kerjasama dalam program ini serta perannya.



Membentuk Forum

Berangkat dari identifikasi dan analisis tersebut, mereka merumuskan rencana aksi yang akan dilaksanakan dalam program PRB. Rencana aksi tersebut antara lain, membentuk paguyuban PRB yang kelak dinamakan Forum PRB. Pembentukan forum ini difasilitasi oleh Kesbanglimas dan Bina Swadaya pada bulan Februari 2008. Pengurus dan anggotanya merupakan perwakilan dari ari berbagai pemangku kepentingan di desa. Seperti Pemerintah Desa, Perlindungan Masyarakat (Linmas), Karang Taruna, Relawan Desa, PKK, kelompok-kelompok peduli kebencanaan yang ada di desa, dan elemen masyarakat yang lain. Keanggotaan forum bersifat sukarela.

Untuk mengoptimalkan kerja forum, maka struktur organisasi dibentuk berdasarkan kebutuhan. Forum PRB desa Ngargomulyo terdiri dari 12 regu. Yaitu, regu deteksi dini dan pengumpulan data, dapur umum, tandu, evakuasi, caraka / Infokom, SAR, pioneer, pengamanan, pemadam kebakaran, P3K, pelestarian lingkungan, serta regu pemberdayaan dan pelatihan. Ketua forum adalah Kepala Desa, yang didukung pula oleh dua orang pelaksana harian, dua orang sekretaris, dan seorang bendahara.

Setiap bulan tepatnya pada tanggal 15, pengurus forum melakukan pertemuan rutin untuk berkoordinasi. Secara rutin pula forum melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan Kesbanglimas di tingkat kabupaten untuk menyampaikan perkembangan program dan rencana ke depannya.

Peningkatan Kapasitas dan Kesiapsiagaan

Forum menyadari bahwa PRB perlu disosialisasikan kepada seluruh anggota masyarakat agar terjadi transfer pengetahuan dan membangun kesiapsiagaan. Selain itu, sosialisasi diperlukan agar program yang telah mereka susun dapat terlaksana dengan baik dengan dukungan masyarakat. Oleh karena itu, secara terus menerus forum mengadakan kegiatan infosesi PRB melalui pertemuan-pertemuan di tingkat dusun dan ke berbagai kelompok kategorial, serta membagikan stiker dan poster. Untuk memastikan manfaat program bagi kehidupan sehari-hari masyarakat, forum melakukan wawancara dengan masyarakat.

Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapsiagaan anak-anak dalam menghadapi gunung meletus, dilakukan latihan evakuasi dan pengenalan wilayah (*outbond*) bagi murid-murid SD. Forum juga melakukan pengenalan PRB kepada anak-anak usia dini. Tujuannya tidak lain agar semua lapisan usia di desa Ngargomulyo memahami PRB, mempraktekkannya, dan siap dalam menghadapi ancaman bencana.

Untuk mendukung peningkatan kapasitas pengurus dan anggota dalam mengelola forum, dilaksanakan berbagai pelatihan. Yaitu, manajemen organisasi, manajemen keuangan dan penggalangan dana. Sedangkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan, dilakukan latihan simulasi evakuasi, P3K, dan kader siaga. Simulasi evakuasi juga pernah dilaksanakan bekerjasama dengan Kesbanglimas kabupaten Magelang dan jajaran pemerintah desa, dimana masyarakat dilibatkan dalam kegiatan tsb. Kini desa telah dilengkapi peralatan berupa menara pemancar dan radio komunikasi yang berfungsi untuk memberikan peringatan dini saat terjadi bencana. Hal ini melengkapi rute evakuasi yang sudah ditentukan, papan penunjuk arah, dan lokasi titik kumpul yang sudah disepakati. Untuk ke depannya, masyarakat mengusahakan memperbaiki dan membangun jalur evakuasi yang menghubungkan beberapa desa.

Konservasi Hutan

Kegiatan penanaman bibit pohon untuk konservasi hutan dilaksanakan pada awal tahun 2009. Kegiatan ini memiliki manfaat yang luas bagi masyarakat. Di satu sisi, hutan dapat menahan laju awan panas yang meluncur turun saat gunung Merapi meletus dan menjadi peringatan dini bagi masyarakat yang melihat perubahan dari tanaman yang mereka tanam. Sisi yang lain, hutan dapat menahan erosi atau tanah longsor dan sarana penyimpanan air bagi kehidupan masyarakat. Dari sisi ekonomis, keasrian hutan dapat dijadikan objek ekowisata.

Dalam kegiatan ini, sebanyak 6,000 batang sengon, 500 batang petai, dan 500 batang mahoni dibagikan kepada masyarakat di empat dusun untuk ditanam. Keempat dusun tersebut dilalui alur sungai Lamat yang merupakan jalur awan panas, lahar panas, dan lahar dingin. Pasca penanaman, anggota forum mendatangi warga secara berkala untuk memberi informasi cara perawatan pohon-pohon tsb.

Berjejaring

Forum menyadari pentingnya mengembangkan jejaring dengan berbagai pihak untuk mengembangkan wawasan dan koordinasi. Untuk itu, Forum PRB antara lain berjejaring dengan Forum Merapi yang pelakunya adalah lembaga-lembaga dan pemerintah di empat kabupaten. Yaitu, kabupaten Magelang, Klaten, Boyolali, dan Sleman. Selain itu, Forum PRB juga berjejaring dengan Pasag Merapi, sebuah organisasi masyarakat kawasan lereng gunung Merapi yang mengembangkan penerapan manajemen bencana.

Manfaat yang dirasa forum dengan mengembangkan jejaring ini adalah terjalannya komunikasi dan kebersamaan lintas kabupaten yang sinergis. Melalui proses pembelajaran silang, Forum PRB desa Ngargomulyo juga dapat membagikan pengalamannya dalam melakukan penanggulangan bencana.

Jalinan dan keterlibatan Forum PRB dalam berbagai kelompok telah menjadikan desa Ngargomulyo sebagai lokasi kunjungan studi banding dari berbagai lembaga, termasuk dari PRB Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Bantul, dan lembaga-lembaga masyarakat. Kunjungan ini menjadi ajang yang baik untuk bertukar

pengalaman, informasi, dan tentu saja memperkuat jaringan sehingga memudahkan akses pada kesempatan-kesempatan yang ada.

Keberlanjutan Program

Program dan kegiatan PRB telah menjadi kebutuhan di desa Ngargomulyo. Karena itu, masyarakat dan pemerintah desa bertekad untuk terus melaksanakan dan mengembangkan PRB.

Kegiatan PRB kemudian diintegrasikan dalam pembangunan desa dan perangkat pemerintahannya. Misalnya dengan mensahkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Lingkungan yang isinya mendorong melakukan mitigasi dengan melakukan penghijauan. Desa juga telah memiliki prosedur (SOP) tanggap darurat yang disusun bersama antara pemerintah desa bersama dengan masyarakat. Isi prosedur ini menjadi acuan bagi masyarakat untuk menyelamatkan diri saat gunung meletus. Pemerintah desa juga mengalokasikan dana desa (ADD) sebesar satu juta rupiah per tahun untuk kegiatan-kegiatan PRB sehingga dapat dipastikan ada keberlanjutan dan pengembangannya.

Forum dan masyarakat juga menyadari pentingnya penggalangan dana bagi keberlangsungan lembaga dan kegiatannya. Untuk itu, Forum mengembangkan program *live in, outbond*, dan ekowisata kepada pihak di luar desa. Tujuannya, selain menggalang dana, adalah untuk memperkenalkan kehidupan masyarakat yang tinggal di kaki gunung berapi. Selain itu, memperkenalkan pentingnya memahami, bersahabat, serta menghargai alam untuk keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Sedangkan masyarakat mulai mempersiapkan tabungan darurat, yaitu uang dan barang yang disimpan dan dipergunakan saat situasi darurat.

Gunung berapi bukanlah ancaman bencana jika manusia mampu mempersiapkan diri serta orang-orang di sekitarnya dalam menghadapinya. (Kristanto, Sutarji).

Refleksi Seorang Pendamping: Melakukan yang Terbaik Bersama Masyarakat.

Kristanto Ari Wibowo

Desa Ngargomulyo terletak di ketinggian paling selatan dari kecamatan Dukun, kabupaten Magelang. Berjarak kurang lebih 7 km dari puncak gunung Merapi, menjadikan desa ini dekat dengan sumber letusan gunung yang aktif. Debu vulkanik dan awan panas yang menyertai letusan gunung merupakan ancaman bagi masyarakat. Setiap dua tahun sekali warga desa Ngargomulyo mengalami letusan gunung. Ketika hal tersebut terjadi, masyarakat mengungsi ke daerah yang aman.



Peristiwa alam tersebut dimaknai warga untuk mengembangkan kearifan lokal dan tradisi yang semakin mendekatkan mereka dengan alam. Masyarakat di desa ini memiliki tradisi dan kesenian lokal yang masih diselenggarakan hingga saat ini. Seperti kesenian *jangkrik ngenthir* dan *shalawatan angguk*.

Kesetiaan menjalankan tradisi dan kearifan lokal inilah yang membuat kelestarian hutan tetap terjaga. Masyarakat mempunyai tradisi menebar benih atau disebut *nguri-uri* karena mereka yakin hutan yang luasnya 400 Ha mendukung kelangsungan hidup penduduk desa. Hutan merupakan sarana penampung air disamping menjadi “tameng” ketika gunung menyemburkan awan panas.

Untuk melestarikan air, masyarakat membuat Gerakan Cinta Air dan membentuk paguyuban yang terkenal, yaitu paguyuban Tuk Mancur. Bagi masyarakat, air bukan sekedar pemenuhan kegiatan hidup sehari-hari namun juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekowisata dan *outbond*. Misalnya melakukan susur sungai dan mata air yang dikemas dengan menarik untuk menggugah serta meningkatkan kepedulian terhadap alam.

Kesuburan tanah di kaki gunung ini membentuk warga desa Ngargomulyo menjadi masyarakat agraris yang mengolah berkah tersebut untuk ditanami padi-padian, berbagai macam sayuran, dan lainnya. Di samping sebagai petani, masyarakat juga banyak menjadi peternak yang hasilnya dimanfaatkan untuk peningkatan ekonomi.

Kekayaan serta keberagaman alam dan kesenian desa juga tercermin dari sisi religisitas. Masyarakat desa Ngargomulyo merupakan masyarakat heterogen. Sekitar 60% penduduk menganut Islam dan 40% Katolik. Dalam hidup keseharian, mereka hidup rukun penuh kedamaian. Hal ini tercermin saat Hari Raya Idul Fitri dimana umat Katolik mengunjungi tetangga-tetangga yang Muslim. Begitu pula ketika Natal, umat Muslim mengunjungi rumah warga yang merayakan Natal.

Ketika program pengurangan risiko bencana (PRB) dikenalkan di desa Ngargomulyo oleh Bina Swadaya dan Cordaid, masyarakat menanggapinya dengan baik. Hal ini terlihat jelas dari partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan. Saya, sebagai pendamping dari Bina Swadaya mengedepankan aspek humanisme atau kemanusiaan dan pelibatan masyarakat dalam menerapkan kegiatan program. Dengan demikian, program ini menjadi milik dan bagian masyarakat itu sendiri.

Pendampingan saya laksanakan dengan pendekatan berbasis kearifan lokal. Bersama masyarakat kami mengaplikasikan teori-teori pengurangan risiko bencana dalam kehidupan keseharian. Saya mengajak masyarakat untuk mengamati lingkungan sekitar mereka dan menganalisisnya dengan pemahaman, nilai,

dan tradisi lokal. Pendekatan-pendekatan inilah yang saya anggap kunci dalam setiap pendampingan yang saya lakukan. Kami bersama-sama menggali pengetahuan, pengalaman dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat, kemudian menguatkan dengan pengetahuan dan teknologi kebencanaan, sehingga masyarakat memiliki kepercayaan diri dan kemampuan merancang serta melakukan upaya-upaya pengurangan risiko bencana.

Kami membentuk suatu wadah partisipasi yang terdiri dari berbagai unsur di masyarakat, kami sebut sebagai Forum Pengurangan Risiko Bencana (F-PRB) yang juga berperan sebagai tim penggerak sekaligus motivator masyarakat. Banyak tantangan dan dorongan yang saya hadapi dalam melakukan pendampingan PRB. Kedua hal itu menimbulkan ide yang saya coba tawarkan dan tuangkan ke masyarakat. Misalnya ketika akan menyelenggarakan pelatihan tentang pemahaman pengurangan risiko bencana untuk anak-anak Sekolah Dasar, terpikirkan oleh saya bahwa kegiatan ini dapat difasilitasi oleh Forum PRB sendiri. Bukankah mereka yang paling mengenal karakteristik wilayah mereka dan mereka semua pernah mengalami situasi saat gunung meletus!

Sewaktu saya mengajukan usulan itu, awalnya Forum PRB menolak karena tidak yakin bisa melakukannya. Dengan sedikit membujuk, saya meyakinkan mereka. Lalu mereka menerima usul tersebut. Lalu, Forum merancang kegiatan dan mengkonsultasikannya kepada saya.

Untuk memberikan dukungan kepada Forum, kami mengundang ibu Anat Prag dari Cordaid untuk berkunjung saat pelaksanaan pelatihan PRB untuk anak-anak tersebut. Ibu Anat bertanya kepada saya, “Fasilitatornya dari lembaga apa?” Saya jawab, “Semuanya dipersiapkan dan dikerjakan oleh Forum”. Ibu Anat mempertanyakan, “Apakah mereka bisa?” Dengan penuh keyakinan, saya bilang: “Bisa!” Setelah mengikuti proses pelatihan dan tanggapan anak-anak yang senang dengan kegiatan ini, ibu Anat mendekati saya dan memuji, “Kris, *this is really good activity! Proficiat to DRR Forum, children, people, and Bina Swadaya!*”

Pengalaman ini memicu saya untuk terus melakukan yang terbaik bersama masyarakat, Forum PRB, dan pemerintah desa Ngargomulyo. Banyak hal yang saya pelajari dari proses pendampingan ini. Dan semuanya saya kembalikan lagi kepada warga desa untuk kemajuan bersama.

Jika saja setiap orang mengucapkan satu kata kebaikan atau melakukan satu kebaikan setiap harinya, semua kebaikan kecil akan menjadi besar
(*Master Sheng Yen*)

Suyatno, Pemuda Pendidik Tanggap Bencana

Suyatno, pemuda asal dusun Kembang, desa Ngargomulyo, merupakan salah seorang yang banyak berperan dalam kegiatan pengurangan risiko bencana (PRB) di daerahnya. Keterlibatan aktif pemuda murah senyum ini diawali saat gunung Merapi meletus tahun 2006. Suyatno berinisiatif mengumpulkan relawan di sekitar dusun. Lalu mereka mengkoordinir evakuasi penduduk serta distribusi bantuan, dan melakukan kegiatan kemanusiaan lainnya.



Suyatno, paling depan

Pemuda ini memang mempunyai semangat luar biasa untuk berperan dalam memajukan desanya, antara lain melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi. Ia ditunjuk oleh Kepala Desa sebagai salah satu orang yang bertanggung jawab dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di desa Ngargomulyo. Menurut Suyatno, kemiskinan – apalagi jika hal ini tidak dapat diselesaikan – merupakan salah satu bentuk bencana yang dapat dikurangi risikonya melalui pemberdayaan ekonomi.

Saat program PRB diperkenalkan di Desa Ngargomulyo oleh Bina Swadaya dan Cordaid, Suyatno dan Pak Sutarno dipercaya menjadi pengurus Forum PRB untuk Pokja Pendidikan dan Pelatihan.

Salah satu hal menarik yang pernah ia dan mitra kerja satu Pokja kembangkan adalah merancang pelatihan PRB untuk anak-anak, dengan metode yang sederhana sehingga mudah dipahami dan menyenangkan. Pelatihan dilaksanakan di tiga sekolah dasar di desa Ngargomulyo. Yaitu, SD Negeri Inpres, SD Guppi, dan SD Kanisius Prontakan.

Kegiatan pelatihan tersebut antara lain, pemutaran film tentang bencana, melakukan simulasi evakuasi

ketika gunung meletus, dan menggambar gunung Merapi saat meletus. Kegiatan lainnya adalah *outbound* untuk mengenalkan wilayah di sekitar desa mereka yang rawan ketika terjadi bencana. Misalnya sungai tempat aliran lahar dan lereng gunung. Kemudian anak-anak dibimbing untuk menyusuri jalur evakuasi menuju lokasi pengungsian. Kemudian mereka diajak mengunjungi balai tempat alat pendeteksi banjir lahar dipasang dan petugas balai menerangkan fungsi alat tersebut. Anak-anak juga diajarkan pentingnya kerjasama dan saling menolong ketika bencana terjadi.

Kegiatan ini mendapatkan apresiasi yang sangat baik dari berbagai pihak, termasuk dari ibu Anat Prag (Cordaid). Metode pelatihan partisipatif yang sesuai dengan daya tangkap anak-anak dan berdasarkan kearifan lokal, membuat kegiatan ini dinilai mampu meningkatkan pemahaman dan ketrampilan anak-anak dalam kesiapsiagaan menghadapi gunung meletus di wilayahnya.

Proses dan hasil pelatihan PRB untuk anak-anak direfleksikan oleh Suyatno serta tim Pokja Pendidikan dan Pelatihan. Hasil refleksi tersebut diolah menjadi tindak nyata yang lain, yaitu memproduksi media belajar PRB untuk anak-anak dalam bentuk *banner*. Isinya, informasi cara menyelamatkan diri saat terjadi bencana. Disamping itu, Suyatno mengumpulkan anak – anak usia dini di dusunnya. Setiap hari Jumat dia mengajar tentang PRB pada anak – anak tersebut.

Suyatno aktif mengikuti berbagai kegiatan terkait isu pendidikan PRB untuk pengayaan isu serta konsep, dan perluasan jejaring. Salah satu kegiatan yang diikutinya adalah *workshop* Strategi Nasional Pendidikan PRB pada bulan Mei 2009. Suyatno menerapkan dengan cara-cara sederhana hasil *workshop* tersebut kepada masyarakat dan anak-anak didiknya berdasarkan pengalaman di lapangan.

Walaupun banyak ide dan terobosan yang sudah dilakukan, namun Suyatno mengakui bahwa dia masih memerlukan referensi untuk mengembangkan PRB gunung berapi untuk anak-anak. Namun tidak mendapatkan referensi dimaksud. Meski demikian, hal ini tidak menyurutkan semangat Suyatno untuk terus berkiprah di lembaga dan wilayahnya dan terus mengembangkan ide-ide segar lainnya.

Cita-cita yang ingin diwujudkan pemuda ini yaitu menuangkan pengalamannya dalam melaksanakan dan mengembangkan PRB menjadi sebuah buku pembelajaran PRB untuk anak. Semoga cepat terwujud, Mas... (AL. Kristanto Ari W, pendamping)

Yatin, Bapak Desa dari Ngargomulyo

Dalam bahasa Indonesia, Ngargomulyo berarti gunung yang penuh kelimpahan. Dan begitulah kenyataannya. Masyarakat desa Ngargomulyo hidup di lereng dan kaki gunung Merapi, berdampingan dengan hutan yang masih asri serta indah, dan berkelimpahan air.

Kala pagi merekah, burung–burung berkicau merdu di bawah dedaunan yang masih lebat dan diiringi suara gemericik air mengalir deras dari mata air Merapi. Dalam hidup keseharian masyarakat, gunung Merapi menjadi bagian hidup mereka. Baik sebagai sumber penghidupan maupun teman dalam menyusuri kehidupan. Oleh karena itu, masyarakat tidak asing dengan letupan-letupan kawah Merapi yang mengeluarkan awan panas dan abu vulkanik setiap dua tahun sekali.

Di desa yang indah inilah Yatin dilahirkan dan tinggal. Semasa muda ia pernah menjadi ketua Badan Pembangunan Desa (BPD) Ngargomulyo. Semasa berkarya di BPD, Yatin dengan berani menentang penambangan pasir di wilayah Ngargomulyo. Hal ini menimbulkan perdebatan antara dirinya dengan pengusaha pasir dan pemerintah setempat. Dampak keberaniannya dapat dilihat dan dinikmati hingga saat ini. Desa Ngargomulyo merupakan daerah yang subur dan terjaga kelestariannya tanpa ada kerusakan lingkungan yang parah, dibandingkan dengan desa sekitar yang sudah menurun keasriannya. Dalam merencanakan kegiatan pembangunan, Yatin tetap dengan perspektif kelestarian lingkungan alam karena makna pembangunan bukan fisik semata.

Kini pria yang murah senyum ini menjadi orang nomor satu di desa Ngargomulyo, yaitu kepala desa. Sebagai kepala desa, ia merasa “bodo”. Bodo artinya karena beliau menempatkan masyarakat dengan perannya mengawasi dan mengkritisi jalannya pemerintahan desa yang beliau pimpin. Sehingga dalam melayani masyarakat, ia selalu berpegang teguh pada prinsip mengedepankan kepentingan masyarakat, menjadi teman serta pelayan yang baik bagi mereka, memberi motivasi tanpa harus menggurui.

Ketika Bina Swadaya dan Cordaid memperkenalkan program pengurangan risiko bencana, kepala desa yang lugas dalam berbicara ini, menyambut baik dan sangat mendukung. Menurutnya, pengurangan

risiko bencana merupakan bagian penting dari warga masyarakat desa. Di sela-sela kesibukannya, Yatin selalu menyempatkan diri untuk terlibat dalam berbagai pertemuan dan kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Bina Swadaya. Hal ini merupakan komitmen yang ia pegang untuk selalu memfasilitasi masyarakat dalam berbagai kegiatan. Dan masyarakat sangat menghargai komitmen tersebut.

Sebagai penggerak dan tokoh masyarakat desa, Yatin dipercaya masyarakat menjadi ketua Forum PRB desa Ngargomulyo. Sebagai ketua Forum PRB sebenarnya Yatin lebih berfungsi sebagai pelindung dan fasilitator. Sedangkan pelaksana kegiatan harian diserahkan pada penanggungjawab harian Forum PRB dan musyawarah mufakat menjadi keputusan yang selalu beliau bangun. Menurutnya, Forum PRB merupakan kebutuhan masyarakat mengingat mereka tinggal di daerah rawan bencana. Forum PRB diharapkan menjadi wahana pembelajaran dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengatasi berbagai bentuk bencana.

Keberhasilan Yatin dalam mengembangkan program PRB bersama Forum diantaranya adalah mengintegrasikan kegiatan PRB menjadi bagian dari kegiatan pembangunan desa. Yatin membangun kesiapsiagaan dan ketahanan masyarakat terhadap bencana melalui sistem pengorganisasian dan perangkat kelembagaan sosial mulai dari tingkat RT, RW, dusun hingga ke desa. Intinya, semua unsur yang ada di dalam masyarakat dilibatkan dalam semua kegiatan. Kegiatan tsb misalnya kegiatan identifikasi dan pemutakhiran (*up date*) data, pengumpulan dana, pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, simulasi evakuasi dan tanggap darurat, penghijauan hutan, membangun sistem peringatan dini dan penetapan Perdes Pengelolaan Lingkungan yang terkait dengan upaya PRB, senantiasa dilakukan bersama masyarakat dan untuk keberdayaan masyarakat.

Sebagai kepala desa, Yatin selalu berusaha menyebarluaskan dan mengkampanyekan upaya-upaya pengurangan risiko bencana melalui kerjasama dan koordinasi dengan dinas-dinas pemerintahan terkait di tingkat kabupaten. Strategi lainnya adalah dengan cara berbagi pengalaman dalam melakukan pengurangan risiko bencana kepada kepala desa tetangga saat rapat koordinasi kepala desa.

Semoga tekad luhur dan tindakan-tindakan nyata yang diberikan sosok Yatin ini menjadi teladan kita semua. (AL. Kristanto Ari W, pendamping)